

RANCANGAN RENCANA KERJA

(RENJA) Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

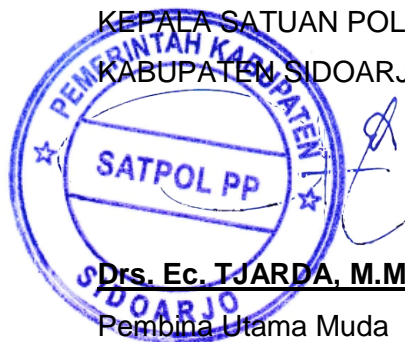
Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing – masing Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Rencana Kerja (Renja) ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sidoarjo, 14 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. TJARDA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19640105 198801 1 003

DAFTAR ISI

Kata pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I : Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV : Rencana Kerja dan pendanaan PD	34
BAB V : Penutup	42

DAFTAR TABEL

2.1 Ralisasi Program/Kegiatan.....	10
2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Per-Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.....	12
2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD.....	13
2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.....	14
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.....	21
2.6 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
2.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap OPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah". Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Renja OPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dari urusan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana

Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menjabarkan visi dan misi serta mewujudkan masyarakat yang religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hubungan Antar Dokumen :

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2024 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat Pusat, dokumen perencanaan di Tingkat Provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024 dan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan

keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 75);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja PD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidoarjo, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang seralasan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan” dan selaras dengan Misi 5 Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan antar warga.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang 23 Tahun 2014.

Disamping itu selain yang disebutkan di atas tujuan lain yang hendak dicapai adalah:

1. Memberikan gambaran kemampuan OPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi;
2. Sebagai acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam

- mengoperasionalkan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan pendanaan PD

BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian / Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian / Lembaga.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun lalu (tahun 2022) sampai dengan tahun berjalan pada 2023.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) sebesar Rp. 27.715.469.323,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.226.520.430,00 atau 98,24 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2022		
	ANGGARAN setelah PAK	REALISASI s/d 31 Des 2018	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.909.740.662,00	16.909.740.662,00	98,14
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.927.500,00	62.308.450,00	99,02
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.916.222.171,00	12.625.412.235,00	97,75
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	-
1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.565.000,00	71.775.000,00	98,91
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.998.733.078,00	1.995.052.092,00	99,82

PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2022		
	ANGGARAN setelah PAK	REALISASI s/d 31 Des 2018	%
1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.110.875,00	42.095.875,00	95,43
1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.393.719.750,00	1.380.946.387,00	99,08
1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.684.038,00	501.934.200,00	98,48
2. Progam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.805.728.661,00	10.631.187.941,00	98,38
2.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.592.015.345,00	9.549.469.543,00	99,56
2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.100.393.316,00	968.428.494,00	88,01
2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	113.320.000,00	113.289.904,00	99,97
JUMLAH	27.715.469.322,00	27.226.520.430,00	98,24

Secara umum, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2022 relatif baik dan berhasil, dengan tingkat realisasi daya serap Anggaran Belanja sebesar 98,24 %. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya di bawah 100%.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Capaian Kinerja Per-Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	2021		2022	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target	Realisasi	Target	Realisasi
				1.	Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat	Rasio jumlah anggota Linmas terhadap jumlah RT	Jumlah anggota Satlinmas : Jumlah RT x 100 %
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	- Prosentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan	Gangguan trantibum yang diselesaikan : gangguan trantibum yang ditangani x 100 %	100	100	100	100
		- Prosentase penanganan pelanggaran peraturan daeah yang diselesaikan	Pelanggaran perda yang diselesaikan : pelanggaran yang dipantau/ ditemukan dikali 100 %	100	100	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam standar pelayanan minimum (SPM) maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indicator yang dikaji serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sidoarjo.

Berikut tabel 2.3 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG KEETENTRAMAN N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Indeks Rasa Aman	-	-	76,00	76,02	76,03	76,04	76,08	76,26	76,75	77,25	Renstra OPD 2016-2021

Pada tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan ketercapaian kinerja yaitu tahun 2020 hingga 2021 dibandingkan dengan target kinerja diketahui bahwa indeks rasa aman di Kabupaten setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat, sehingga akan berdampak positif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

1. Identifikasi Permasalahan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut identifikasi permasalahan :

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	<p>Perlunya sistem keamanan yang efektif, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, serta penegakan perda/perkada</p>	<p>1) Belum optimalnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>(1) Belum efektifnya pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>(2) Belum optimalnya Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat</p> <p>(3) Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan perlu ditingkatkan.</p> <p>(4) Adanya permasalahan ketenagakerjaan berdampak munculnya unjuk rasa buruh dan kejadian insidentil maupun bentuk provokasi lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.</p>
		<p>2) Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib di masyarakat;</p>	<p>1) Anggota Satlinmas belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dan Diklat lainnya</p> <p>2) Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>dan ketertiban masyarakat</p> <p>3) Belum optimalnya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibumtranmas</p>
		<p>3) Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten</p>	<p>1) Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menimbulkan dilema dalam penindakan terhadap orang dan/atau badan usaha yg melanggar ketentuan Perda karena harus mempertimbangkan nasib para pekerjanya /karyawan justru dapat meningkatkan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo</p> <p>2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah</p> <p>3) Terbatasnya cakupan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati</p> <p>4) Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi program dan kegiatan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			antar OPD untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggar Perda antara lain penanganan para PKL, menertibkan Bangunan Liar, Penanganan para PMKS (anjak) yang beroperasi di pinggir jalan dan masalah lainnya
		4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota SATPOL PP dan PPNS serta Linmas	Keterbatasan SDM Pol PP baik secara jumlah maupun kompetensi yang dimiliki : 1. Dari jumlah Pegawai PNS dan Non PNS sebanyak 328, sebanyak 89% dengan tingkat pendidikan SLTA dan baru sekitar 35% yang sudah mengikuti Diklatsar Pol PP. 2. Terbatasnya Pol PP yang mempunyai kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih periode tahun 2021-2026 telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan". Yang dimaksud dengan "Sidoarjo Sejahtera" adalah menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala

aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

"Sidoarjo Maju" merupakan manifestasi dari diksi "Menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.

"Sidoarjo Berkarakter" merupakan nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

Sedangkan "Pembangunan Berkelanjutan" merupakan pembangunan yang dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo juga mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo selain mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 – 2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan

- mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
 4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;
 5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan Misi RPJMD tersebut di atas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, terkait pada misi kelima RPJMD yaitu; “Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga”.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat internasional, nasional dan lokal, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 dirumuskan isu startegis pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- (1) Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- (2) Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan
- (3) Harmoni Sosial yang berbasis Kesetaraan, Keamanan dan Ketentraman serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat
- (4) Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter.
- (5) Pengembangan infrastruktur Berkelanjutan dan Sistim Transportasi Terpadu.
- (6) Peningkatan Investasi, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis

Isu startegis yang terkait Harmoni Sosial yang berbasis Kesetaraan, Keamanan dan Ketentraman serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat, meliputi :

- a) Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, antidiskrimasi SARA, gotongroyong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal
- b) Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- c) Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- d) Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
- e) Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll

Tujuan dari misi ke 5 RPJMD tersebut di atas adalah: “Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat”, dan untuk mencapai misi dan tujuan tersebut, Sasaran RPJMD yang mendukung adalah: “Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram”, dengan indikator Indeks Rasa Aman.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas-tugas tersebut dilakukan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dan dinamis yang harus terus dijaga dan dipelihara dengan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 -2026 telah ditetapkan program yang harus dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran, yaitu “Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum “

Hal – hal yang dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang telah ditetapkan dalam RPJMD, adalah adanya komitmen yang kuat antara pihak eksekutif dan legislative khususnya terhadap penyediaan pendanaan yang cukup memadai dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun hal – hal yang dapat menjadi penghambat antara lain:

- Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi serta kurangnya saling dukung diantara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas program dan kegiatan ketertiban umum , baik dari sisi perencanaan maupun

pelaksanaannya terutama terkait penanganan pasca penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

- Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkada
- Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas dan penanganan atas gangguan yang terjadi
- Belum optimalnya Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kompetensi Aparatur Pol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, maka penyusunan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Renja 2023, untuk nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 yang diperuntukkan bagi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Pada tabel berikut ini telah dijabarkan hasil Rancangan Awal Renja. Nantinya hasil rancangan awal Renja tersebut dapat berubah ketika dilakukan analisis kembali kebutuhan lebih lanjut dan akan dimasukkan ke dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Akhir.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya. Berikut tabel tujuan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	18.969.072.903	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88%	14.953.343.257
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laopran evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	1. 100 % 2. 5 dokumen	182.309.584	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen laopran evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	1. 100 % 2. 5 dokumen	7.186.284
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.376.584	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.981.784
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.941.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.941.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	176.992.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.263.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	12.446.913.752	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	12.023.753.598
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104 Org/Bln	12.464.697.916	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12.021.537.762
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2.215.836	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	2.215.836
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 95 % 2. 100 %	111.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 3. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 95 % 2. 100 %	0

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang	0	111.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Persentase ASN yang disiplin 5. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1. 90 % 2. 90 %	647.124.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1. 95 % 2. 100 %	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	2 paket	647.124.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	2 paket	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86	2.455.711.319	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86	1.365.902.797
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	13.296.234	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	13.296.234
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	32.600.152	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	24.171.095
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	39.679.903	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	25.000.597
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	715.001.830	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	715.001.830
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	9.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	3 dokumen	5.383.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	3 dokumen	5.383.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	9.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	9.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.631.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	564.549.841
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	85 %	1.558.154.260	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	85 %	1.156.891.578
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	316.782.660	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 laporan	1.241.371.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 laporan	

		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	Pengadaan Barang milik Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2 jenis	827.891.930	Pengadaan Barang milik Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2 jenis	13.880.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis	177.891.930	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis	13.880.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	80 %	811.122.250	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	80 %	385.729.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	122.584.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 unit	468.537.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 unit	220.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 item	120.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 item	60.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.729.000
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentranganTingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketentrangan	Baik	10.824.000.567	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentranganTingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketentrangan	Baik	10.845.360.113
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentrangan masyarakat b. Jumlah patroli yang dilakukan	a. 38 titik b. 1096 patroli	11.513.126.584	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentrangan masyarakat b. Jumlah patroli yang dilakukan	a. 38 titik b. 1096 patroli	8.784.239.236
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	200 kasus	1.907.818.608	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	a. 200 kasus	1.380.778.800

	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	325 kasus	7.590.000.325	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	325 kasus	7.284.597.029
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 dokumen	124.150.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 dokumen	0
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	995.281.634	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	81.163.407
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	298 org	137.700.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	298 org	37.000.000
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	50.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	0
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibumtranmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	19.050.000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibumtranmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0
	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan	Prosentase terfasilitasinya	100 %	559.551.677	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan	Prosentase terfasilitasinya penegakan Perda/Perbub	100 %	1.941.821.677

	Peraturan Bupati/ Walikota	penegakan Perda/Perbub yang ditemukan atau ditangani			Peraturan Bupati/ Walikota	yang ditemukan atau ditangani		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 laporan	22.675.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 laporan	1.022.400.000
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kotaperaturan bupati	4 laporan	60.640.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kotaperaturan bupati	4 laporan	0
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	476.236.677	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	919.421.677
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase PPNS yang terfasilitasi pembinaan atau pengembangan karir	100 %	129.574.340	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase PPNS yang terfasilitasi pembinaan atau pengembangan karir	100 %	119.299.200
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 lapoan	129.574.340	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 lapoan	119.299.200

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	14.953.343.257
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laopran evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	1. 5 dokumen 2. 7 laporan	7.186.284
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.981.784
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.941.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.263.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%	12.023.753.598
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 org/bln	12.021.537.762
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2.215.836

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 95 % 2. 100 %	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang	0	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1. 95 % 2. 100 %	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	2 paket	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	86	1.365.902.797
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	13.296.234
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	24.171.095
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	25.000.597
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	715.001.830
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	9.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	5.383.200
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	9.500.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	564.549.841
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	85 %	1.156.891.578
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	253.239.978
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	903.651.600
7	Pengadaan Barang milik Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2 jenis	13.880.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis	13.880.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	80 %	385.729.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 unit	220.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	60.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.729.000
II	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketenteramanTingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketenteraman	Baik	10.845.360.113
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat b. Jumlah patroli yang dilakukan	a. 38 titik b. 1096 patroli	8.784.239.236
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	200 kasus	1.380.778.800
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	325 kasus	7.284.597.029

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 dokumen	0
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	81.163.407
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pe Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	298 org	38.683.450
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	0
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tibumtranmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0
2	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Prosentase terfasilitasinya penegakan Perda/Perbub yang ditemukan atau ditangani	100 %	1.941.821.677
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada	4 laporan	1.022.400.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
		Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha		
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 laporan	0
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 laporan	919.421.677
3	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase PPNS yang terfasilitasi pembinaan atau pengembangan karir	100 %	119.299.200
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 lapoan	119.299.200
	JUMLAH			25.798.703.370

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis Kinerja, berjangka menengah dan sistem penganggaran terpadu. Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, maka diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan Kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan).

Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output). Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output), serta berbasis pada tugas dan fungsi OPD atau unit kerja, maka Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan OPD. Hasil Restrukturisasi ini akan menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo yang diterapkan mulai Tahun 2017, bersama dengan RPJMD baru Tahun 2021- 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sidoarjo telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dalam rangka mencapai Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan (manajemen organisasi) yang profesional;
- b. Mewujudkan perlindungan masyarakat;

- c. Mewujudkan Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya;
- d. Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran yaitu : “Meningkatnya kualitas perlindungan masyarakat Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Perda dan Perkada”

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah/Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 diperlukan rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan. Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain :

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 –2026 dan hasil review Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan;

Secara garis besar rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 program di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo, Program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Sidoarjo

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

No	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PAGU INDIKATIF 2024 (Rp)
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.706.888.379,00		57.639.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.465.516.779,00		56.739.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			29.465.516.779,00		56.739.000.000,00	
1,	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan</i>	100	17.334.265.195,00	100	20.159.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laopran evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan</i>	1. 5 dokumen 2. 7 laporan	182.309.584,00	1. 5 dokumen 2. 7 laporan	300.000.000,00	
	1.05.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	3.376.584,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2.981.898,00
	1.05.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	4 Dokumen	1.941.000,00	4 Dokumen	50.000.000,00	1.941.000,00
	1.05.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi</i>	4 Laporan	176.992.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	2.257.885,00

			<i>Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	94%	12.466.913.752,00	95%	13.815.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1104 Orang/bulan	12.464.697.916,00	1104 Orang/bulan	13.800.000.000,00	12.021.537.762,00
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2 Laporan	2.215.836,00	2 Laporan	15.000.000,00	2.215.836,00
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi</i>	1. 95 % 2. 100 %	111.000.000,00	1. 95 % 2. 100 %	200.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 Dokumen	111.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat</i>	1. 95 % 2. 100 %	647.124.600,00	1. 95 % 2. 100 %	350.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	342 Paket	647.124.600,00	342 Paket	350.000.000,00	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat</i>	86	2.621.120.419,00	86	3.379.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	13.296.234,00	2 Paket	27.000.000,00	13.296.234,00
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	32.600.152,00	4 Paket	35.000.000,00	24.173.083,00
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang</i>	4 Paket	39.679.903,00	4 Paket	43.000.000,00	25.000.000,00

			<i>Disediakan</i>					
1.05.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	880.410.930,00	3 Paket	900.000.000,00	715.001.830,00
1.05.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	9.000.000,00	4 Paket	25.000.000,00	9.000.000,00
1.05.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	5.383.200,00	3 Dokumen	9.000.000,00	5.383.200,00
1.05.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	4 Laporan	9.500.000,00	4 Laporan	40.000.000,00	9.500.000,00
1.05.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	1.631.250.000,00	12 Laporan	2.300.000.000,00	585.631.089,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	2 Jenis	177.891.930,00	4 Jenis	775.000.000,00	
1.05.01.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	0,00	2 Unit	650.000.000,00	-
1.05.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit	177.891.930,00	8 Unit	125.000.000,00	13.880.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			<i>Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran</i>	85%	1.558.154.260,00	85%	450.000.000,00	-
1.05.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	316.782.660,00	4 Laporan	450.000.000,00	253.239.978,00
1.05.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan</i>	4 Laporan	1.241.371.600,00	4 Laporan	900.000.000,00	615.928.800,00

			<i>Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>					
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi</i>	80%	811.122.250,00	80%	890.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	30 Unit	122.584.850,00	30 Unit	140.000.000,00	65.000.000,00
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	70 Unit	468.537.400,00	70 Unit	400.000.000,00	240.000.000,00
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	75 Unit	120.000.000,00	75 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	20.000.000,00
2,	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ketertiban dan ketentramanTingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban dan ketentraman</i>	Baik	12.131.251.584,00	Baik	36.580.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah titik lokasi yang dilakukan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</i>	1. 42 Titik 2. 1096 patroli	11.125.000.567,00	1. 42 Titik 2. 1096 patroli	34.480.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil</i>	4 Dokumen	124.150.000,00	4 Dokumen	700.000.000,00	

			<i>Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>					-
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	4 Dokumen	1.100.281.634,00	4 Dokumen	1.200.000.000,00	95.620.000,00
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia							
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	298 Orang	137.700.000,00	320 Orang	180.000.000,00	38.683.450,00
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	3 Dokumen	19.050.000,00	3 Dokumen	1.200.000.000,00	-
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							
			<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	0,00	-
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
			<i>Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan</i>	200 kasus	1.907.818.608,00	200 kasus	18.200.000.000,00	1.380.778.800,00

			<i>Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>					
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
			<i>Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>	325 Kasus	7.786.000.325,00	325 Kasus	13.000.000.000,00	7.247.800.325,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		<i>Prosentase terfasilitasinya penegakan Perda/Perbub yang ditemukan atau ditangani</i>	100%	876.676.677,00	100%	1.750.000.000,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha</i>	4 Laporan	39.200.000,00	4 Laporan	400.000.000,00	1.022.400.000,00
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP</i>	4 Laporan	776.836.677,00		1.200.000.000,00	1.218.153.000,00
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan</i>	4 Laporan	60.640.000,00	4 Laporan	150.000.000,00	-

			<i>Bupati/Wali Kota</i>					
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase PPNS yang terfasilitasi pembinaan atau pengembangan karir</i>	100%	129.574.340,00	100%	350.000.000,00	
	1.05.02.2.03 .0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada</i>	2 Laporan	129.574.340,00	2 Laporan	350.000.000,00	119.299.200,00
	J U M L A H				30.706.888.379,00		57.639.000.000,00	25.798.703.370,00

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan terutama pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah atau jangka panjang. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan, yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2024 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan tahun berjalan.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

Sidoarjo, 14 Juli 2023


KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO
Drs. Ec. TJARDA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19640105 198801 1 003